

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Meningkatnya tuntutan dari masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah yang baik telah mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menerapkan akuntabilitas publik. Akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Pemerintah daerah mengeluarkan PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang sekarang diubah menjadi PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual yang diberlakukan tahun anggaran 2015. Penyusunan laporan keuangan berbasis akrual merupakan upaya pemerintah untuk memperbaiki dan meningkatkan pertanggungjawaban keuangan negara yang berkualitas. Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, terdapat 4 (empat) kriteria yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki. Keempat kriteria tersebut yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Proses pengelolaan keuangan

daerah yang ada dalam suatu instansi harus ditata sedemikian rupa agar menghasilkan pengelolaan keuangan yang efektif. Dalam pengelolaan keuangan tersebut, akan terlihat dari hasil pemeriksaan BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan). BPK akan mengeluarkan opini dalam bentuk WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), WDP (Wajar Dengan Pengecualian), Tidak Wajar (*Adversed*) dan Tidak Memberikan Pendapat (*Disclaimer*).

Fenomena terkini yang timbul dari beberapa pernyataan, berdasarkan informasi yang bersumber dari *www.finance.detik.com* pada 19 Juli 2018 bahwa Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengungkapkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk laporan keuangan dari lembaga/institusi hanya sebagai tanda bahwa proses telah disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Oleh karena itu, predikat WTP tidak menjamin bahwa suatu institusi bebas dari tindakan korupsi, atau boros dalam menyusun anggaran.

Tabel 1.1
Daftar opini laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2014 s.d. 2018

Entitas Pemerintah Daerah	Opini Tahun 2014	Opini Tahun 2015	Opini Tahun 2016	Opini Tahun 2017	Opini Tahun 2018
Kota Pontianak	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: www.bpk.go.id

Kota Pontianak termasuk kota yang mampu mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian dalam 5 tahun terakhir. Hal ini dapat dilihat dari tabel 1 yang menunjukkan bahwa dari tahun 2014 hingga tahun 2018. Walaupun Pemerintah Kota Pontianak dapat mempertahankan Wajar Tanpa Pengecualian, namun masih terdapat sejumlah catatan yang harus

diselesaikan oleh Pemerintah Kota Pontianak. Berdasarkan informasi yang bersumber dari *www.pontianak.tribunnews.com* pada 28 Mei 2019 bahwa pengamat sekaligus akademisi Universitas Tanjungpura Pontianak, Nella Yantiana menilai masih ada sejumlah langkah yang harus dilakukan Pemerintah Kota Pontianak untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan dimasa mendatang.

Berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah, sehingga standar akuntansi pemerintah ini merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Terdapat pengaruh antara standar akuntansi pemerintah pada kualitas laporan keuangan, yaitu SAP diterapkan dilingkungan pemerintah, baik di pemerintah pusat maupun daerah, sehingga penerapan SAP akan berdampak pada peningkatan kualitas laporan keuangan di pemerintahan pusat dan daerah. Penelitian terdahulu yang mendukung penerapan standar akuntansi pemerintah mempengaruhi kualitas laporan keuangan, yaitu penelitian dari Ramadhani, et al (2019) yang menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian Aulia, et al (2019) juga menunjukkan bahwa pemahaman standar akuntansi pemerintahan

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Operasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Tegal.

Pemanfaatan teknologi informasi juga dapat membantu dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan. Tersedianya teknologi informasi diharapkan dapat membantu dalam proses pelaporan keuangan sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan disebutkan bahwa untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan, dan menyalurkan informasi keuangan kepada pelayanan publik. Penelitian yang telah dilakukan Cahyandari (2017) tentang faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Sukoharjo menunjukkan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian lain yang juga mendukung yaitu Chodijah dan Hidayah (2018) yang menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian Surastiani dan Handayani (2015) yang menunjukkan bahwa pemanfaatan

teknologi informasi tidak mempunyai pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kota Salatiga.

Laporan keuangan yang berkualitas juga ditentukan seberapa baik sistem pengendalian internal yang dimiliki intitusi pemerintah daerah. Dengan lemahnya sistem pengendalian internal menyebabkan sulitnya mendeteksi kecurangan dalam proses akuntansi sehingga bukti audit yang diperoleh menjadi tidak kompeten. Menurut PP Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Penelitian yang dilakukan Chodijah dan Hidayah (2018) mengenai sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian Sundari dan Rahayu (2019) juga menyimpulkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada SKPD Kota Bandung. Sedangkan hasil dari penelitian Cahyandari (2018) bertolak belakang dengan penelitian lainnya yang menyimpulkan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Karanganyar.

Dalam penyusunan laporan keuangan yang berkualitas juga dibutuhkan sumber daya manusia yang berkompeten dan memahami aturan penyusunan laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan. Dengan adanya kompetensi sumber daya manusia memiliki peran untuk mendasari seseorang mencapai kinerja dalam pekerjaannya serta merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan entitas yang bersangkutan. Penelitian sebelumnya tentang kompetensi sumber daya manusia dilakukan oleh Alfiani (2017) yang membuktikan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Operasi Perangkat Daerah Kabupaten Tegal. Hal ini didukung oleh penelitian Sundari dan Rahayu (2018) yang menunjukkkn bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian berbeda yang ditunjukkan oleh Wahyuni (2018), Fauzi (2020) bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Setiap organisasi dalam usaha mencapai tujuan dan kualitas laporan yang baik memerlukan dukungan dari atasan. Dukungan manajemen puncak diduga dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Dukungan dari atasan yang diberikan kepada para pegawai dapat berupa motivasi, pengawasan kerja, maupun pelatihan kepada pegawai. Semakin baik dukungan yang diberikan atasan kepada pegawai diharapkan semakin baik pula laporan keuangan pemerintah (Wahyuni,2018). Penelitian yang dilakukan Kurniawati (2018) dukungan manajemen puncak terhadap

kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Karanganyar menyatakan bahwa dukungan manajemen puncak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini juga didukung oleh penelitian Wahyuni (2018) yang menunjukkan bahwa manajemen puncak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian Alfiani (2017) yang menunjukkan bahwa dukungan manajemen puncak tidak mempunyai pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Tegal.

Faktor yang diduga dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan yaitu peran internal audit. Menurut *Institute of Internal Auditing* (dalam Kurniawan, 2015) audit internal merupakan aktivitas penjamin yang independen dan objektif, juga merupakan jasa konsultasi yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kinerja operasi organisasi. Internal audit memiliki tugas untuk mengevaluasi kinerja entitas untuk mengetahui adanya kemungkinan penyimpangan, baik yang bersifat kepatuhan, kecurangan, aktivitas, operasi, atau keefektifan dan relevansi laporan keuangan. Fungsi peran internal audit yang berjalan dengan baik dapat mencegah kecurangan, menghasilkan keluaran yang berharga untuk menjadi masukan bagi pihak auditor eksternal, eksekutif dan legislatif dalam memperbaiki pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. BPK dapat memanfaatkan hasil pengawasan internal audit terutama dari hasil review atas laporan keuangan pemerintah. Internal audit yang profesional dan independen mendorong peningkatan transparansi dan

akuntabilitas pengelolaan keuangan yang dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Sundari dan Rahayu (2019). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada variabel penelitian dan obyek penelitian, penelitian ini menambah tiga variabel yaitu penerapan standar akuntansi berbasis akrual, dukungan manajemen, dan peran internal audit. Sedangkan obyek penelitian dilakukan pada SKPD Dinas di Kota Pontianak.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian yang diajukan adalah **“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan SKPD Dinas Kota Pontianak”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka perumusan masalah yang dapat ditarik dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
2. Bagaimana pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
3. Bagaimana pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?

4. Bagaimana pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
5. Bagaimana pengaruh dukungan manajemen puncak terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
6. Bagaimana pengaruh peran internal audit terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
2. Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
3. Pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
4. Pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
5. Pengaruh dukungan manajemen puncak terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
6. Pengaruh peran internal audit terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi dan referensi pada penelitian dibidang kualitas laporan keuangan guna meningkatkan akuntabilitas dan transparansi kualitas laporan keuangan yang ada pada SKPD Dinas di Kota Pontianak.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkuat penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penerapan SAP berbasis akrual, pemanfaatan teknologi informasi, penerapan SPI, kompetensi SDM, dukungan manajemen puncak dan peran internal audit terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan dalam meningkatkan ilmu pengetahuan dibidang akuntansi sektor publik khususnya kualitas laporan keuangan, dan dapat menjadi media informasi untuk penelitian lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat menjadi sarana dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh peneliti dibangku kuliah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.

b. Bagi SKPD Dinas di Pontianak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan dasar acuan dalam meningkatkan mutu kualitas laporan keuangan pada SKPD Dinas di Kota Pontianak.

c. Bagi Pembaca

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat serta dapat memberikan gambaran langsung tentang bagaimana pengaruh penerapan SAP berbasis akrual, pemanfaatan teknologi informasi, penerapan SPI, kompetensi SDM, dan peran internal audit terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

3. Manfaat Dari Segi Kebijakan

Hasil penelitian ini akan memiliki kontribusi kebijakan mendukung Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) No. 71 Tahun 2010 dan kebijakan kebijakan lain di lingkungan pemerintah yang akan dipertimbangkan setelah melihat riset yang dilakukan.

E. Sistematika Penulisan

Suatu karya ilmiah memerlukan sistematika dalam penulisan yang baik, teratur dan terperinci. Berikut adalah sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang permasalahan yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan mengenai landasan teori yang memuat teori teori secara konseptual yang diharapkan mampu mendukung pokok pokok permasalahan yang diteliti, tinjauan terhadap penelitian terdahulu, kerangka teoritis dan perumusan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, populasi, sampel dan metode pengambilan sampel, data dan sumber data, metode pengumpulam data, variael penelitian dan metode analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan mengenai analisis data, temuan empiris yang diperoleh dari penelitian, hasil pengujian hipotesis dan pembahasan hasil analisis data.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran, yang diharapkan berguna dan relevan bagi penelitian selanjutnya.